

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 5 Agustus 2014

Subyek : Hutan

Hal : 23

Menteri Kehutanan: Saatnya Bertindak Tegas

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta penegak hukum mulai menindak tegas para pembakar hutan dan lahan di Riau. Itu untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang membuka dan membersihkan kebun dengan cara membakar.

"Saya meminta kepada manggala agni, kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah bertindak tegas. Kalau ada yang nekat membakar, harus ada tindakan tegas," kata Zulkifli, Senin (4/8), se usai halalbihalal dengan para pegawai di Gedung Manggala Wana Bhakti, Jakarta.

Tindakan tegas berlaku bagi siapa pun yang membakar lahan dan hutan. "Siapa pun harus ditindak tegas," kata dia, menjawab pertanyaan seputar banyaknya titik panas dan lahan terbakar di kebun milik perusahaan besar.

Langkah tegas dari penegak hukum itu, kata dia, harus mulai dilakukan sebagai tindakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang. Tentang desakan tindakan tegas yang baru dilakukan sekarang, ia mengatakan, sebelumnya Kementerian Kehutanan mengutamakan sosialisasi akan bahaya pembakaran dan pelarangan membakar bagi perkebunan dan pemegang hak hutan tanaman industri.

"Sosialisasi sudah kami lakukan. Bayangkan kalau ada yang masih memikirkan dirinya sendiri, yaitu membakar untuk membuka kebun sawit. Sementara masyarakat dibuat susah oleh mereka. Karena itu, mereka (pelaku) harus dihukum seberat-beratnya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, mayoritas (75 persen) kebakaran hutan dan lahan gambut berada di kawasan lahan gambut yang sudah menjadi perkebunan. Pemadaman yang sudah dilakukan menambah besar risiko kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan (Kompas, 4/8).

Di sisi lain, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah tidak memberikan efek jera. Pemerintah, oleh sejumlah aktivis lingkungan dan LSM, dinilai tidak serius menangani kebakaran hutan dan lahan yang berulang.

Versi Kemenhut

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Sonny Partono mengatakan, area yang terbakar diidentifikasi sebagian besar berada di kebun yang dikelola masyarakat. "Area hutan konservasi belum ada. (Cagar biosfer) Giam Siak Kecil sempat terbakar, tetapi sebagian kecil saja," kata dia.

Data yang beredar di kalangan aktivis lingkungan, sejumlah petinggi polisi, TNI, anggota DPR, dan pengusaha ditengarai memiliki kapling lahan di kawasan dilindungi itu. Padahal, kepemilikan itu tidak legal.

Analisis Global Forest Watch soal kebakaran hutan dan lahan di Riau, sepekan ini, menunjukkan, kebakaran terjadi di korporasi hutan tanaman industri (10 unit), perkebunan sawit (5), dan logging (2). Lokasi kebakaran 60 persen di lahan gambut.